

Transformasi Kebijakan Pengendalian dan Pemantauan Risiko dalam Navigasi Bank Indonesia Selama Kurun Waktu 5 Tahun Terakhir

Ainur Oktania^{1*}, Dwi Silfani², Noubel Putra Nainggolan³, Hasyim Hasyim⁴

¹⁻³ Prodi Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Medan

⁴ Dosen, Universitas Negeri Medan

Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan

*Korespondensi penulis: ainuroktania0@gmail.com

Abstract: *This research focuses on the transformation of risk control and monitoring policies conducted by Bank Indonesia over the past five years (2018-2023). It uses qualitative analysis methods to examine the evolution of Bank Indonesia's policies through publications of financial institutions such as Bank Indonesia, OJK, and BPK. This study shows that policy impact evaluation plays an important role in identifying areas of improvement and new solutions to enhance policy effectiveness. Bank Indonesia adjusts strategies responsively and proactively to keep up with financial market dynamics and technological developments, and integrates the principles of international standards in banking supervision and risk management. Synchronizing policies with international standards is a top priority for maintaining the credibility of global markets. In facing the challenges of global economic change, technological innovation, and dynamic regulations, Bank Indonesia is committed to conducting in-depth reviews and policy adjustments to face the future. The evolving approach allows Bank Indonesia to strengthen its role in maintaining financial system stability and promoting sustainable economic growth. This research provides insights into Bank Indonesia's successes and challenges in transforming its risk control and monitoring policies.*

Keyword: Risk control, Policy synchronization, Financial stability

Abstrak: Penelitian ini berfokus pada transformasi kebijakan pengendalian dan pemantauan risiko yang dilakukan oleh Bank Indonesia selama lima tahun terakhir (2018-2023). Menggunakan metode analisis kualitatif untuk meneliti evolusi kebijakan Bank Indonesia melalui publikasi lembaga-lembaga keuangan seperti Bank Indonesia, OJK, dan BPK. Studi ini menunjukkan bahwa evaluasi dampak kebijakan memainkan peran penting dalam mengidentifikasi area perbaikan dan solusi baru untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Bank Indonesia menyesuaikan strategi secara responsif dan proaktif untuk mengikuti dinamika pasar keuangan dan perkembangan teknologi, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip standar internasional dalam pengawasan perbankan dan manajemen risiko. Sinkronisasi kebijakan dengan standar internasional menjadi prioritas utama bagi menjaga kredibilitas pasar global. Dalam menghadapi tantangan perubahan ekonomi global, inovasi teknologi, dan regulasi dinamis, Bank Indonesia berkomitmen untuk melakukan kajian mendalam dan penyesuaian kebijakan guna menghadapi masa depan. Pendekatan yang terus berkembang memungkinkan Bank Indonesia memperkuat peran dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Penelitian ini memberikan wawasan tentang keberhasilan dan tantangan Bank Indonesia dalam transformasi kebijakan pengendalian dan pemantauan risiko.

Keywords: Pengendalian risiko, Sinkronisasi kebijakan, Stabilitas keuangan

LATAR BELAKANG

Pemantauan dan penetapan regulasi kebijakan oleh Bank Indonesia merupakan sebuah tantangan yang kompleks dan menuntut. Hal ini disebabkan oleh dinamika yang terus berkembang dalam industri perbankan dan keuangan, baik di tingkat nasional maupun global. Beberapa masalah umum yang terkait dengan tantangan dalam pemantauan dan penetapan regulasi kebijakan Bank Indonesia meliputi fluktuasi pasar keuangan yang tidak terduga, perubahan regulasi internasional, perkembangan teknologi finansial, serta tantangan terkait dengan stabilitas ekonomi dan keuangan nasional.

Received April 11, 2024; Accepted Mei 13, 2024; Published Mei 31, 2024

* Ainur Oktania, ainuroktania0@gmail.com

Sesuai UU No. 23 Tahun 1999 yang telah diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2004, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yaitu kestabilan harga (inflasi) dan nilai tukar rupiah (Warjiyo, 2004). Selain itu, Bank Indonesia dapat didefinisikan sebagai otoritas moneter dan regulator utama di Indonesia yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan dan keuangan. Bank Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan moneter, mengawasi kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur kegiatan perbankan di Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia juga bertugas menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah serta memastikan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Tantangan yang dihadapi Bank Indonesia dalam jangkauan navigasi regulasinya mencakup kompleksitas dinamika ekonomi global dan regional yang berdampak langsung pada pasar keuangan Indonesia. Selain itu, adanya inovasi dan perubahan teknologi dalam industri keuangan juga menjadi faktor yang mempengaruhi pengaturan regulasi Bank Indonesia. Selain itu, tantangan lainnya adalah menyesuaikan regulasi dengan standar internasional untuk memastikan keseimbangan antara efisiensi, keamanan, dan keadilan dalam sistem keuangan nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang peran Bank Indonesia dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pengaturan regulasi kebijakan. Dengan menganalisis dinamika ekonomi dan keuangan terkini serta regulasi yang ada, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang langkah-langkah yang dapat diambil oleh Bank Indonesia untuk mengoptimalkan fungsi pengaturannya. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas dan responsivitas Bank Indonesia terhadap perubahan dan tantangan dalam industri perbankan dan keuangan.

KAJIAN TEORITIS

Prosiklikalitas adalah keadaan mencerminkan sejauh mana suatu kegiatan atau kebijakan ekonomi dapat memperkuat atau meredam fluktuasi ekonomi yang alami. Yoel (2016) menjelaskan bahwa prosiklikalitas merupakan hasil interaksi antara siklus bisnis, perilaku terhadap risiko, dan siklus keuangan (lihat Tabel 1.).

Tabel 1 memberikan gambaran tentang bagaimana siklus prosiklikalitas timbul dari interaksi antara siklus bisnis, siklus keuangan, dan siklus perilaku risiko. Ketika ekonomi sedang berkembang, yang ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang meningkat dalam siklus bisnis, investor cenderung optimis dan mengabaikan risiko, meningkatkan permintaan kredit

dan mengerek harga aset. Pada saat yang sama, risiko di sektor keuangan menurun dan suku bunga cenderung turun seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, mendorong perbankan untuk meningkatkan leverage dan memberikan lebih banyak kredit, yang kemudian memperkuat permintaan kredit dan mengerek harga aset lebih lanjut.

Namun, saat ekonomi berkontraksi, dengan meningkatnya volatilitas makro dan perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam siklus bisnis, optimisme pasar turun dan investor menjadi lebih berhati-hati terhadap risiko, menurunkan permintaan kredit. Akibatnya, perbankan menjadi lebih risk averse dan menurunkan penyaluran kredit. Kelebihan prosiklikalitas dalam sistem keuangan dapat menimbulkan gangguan di sektor keuangan dan ekonomi riil, meningkatkan instabilitas keuangan dan risiko krisis. Untuk mengatasi kecenderungan tersebut, diperlukan kebijakan countercyclical yang dapat mengendalikan pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lambat atau negatif.

Tabel 1. Prosiklikalitas dari Siklus Bisnis, Siklus Perilaku Risiko, dan Siklus Keuangan

Fase	Siklus Bisnis	Siklus Perilaku Risiko	Siklus Keuangan
Fase Ekspansi	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi meningkat 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya keyakinan dan optimisme investor • Meningkatnya perilaku ambil risiko (<i>risk taking</i>) • Permintaan terhadap kredit meningkat 	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian risiko turun, <i>spread</i> suku bunga turun • Harga aset naik mendorong nilai kolateral • <i>Leverage</i> meningkat • Arus modal masuk asing meningkat • Penyaluran kredit naik
Fase Kontraksi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya volatilitas makro • Menurunnya aktivitas perekonomian 	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya keyakinan pelaku pasar • <i>Risk averse</i> • Permintaan kredit menurun 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Loan Loss provision</i> naik • <i>Spread</i> suku bunga naik • Penyaluran kredit turun • Arus modal masuk menurun

Kebijakan Makroprudensial

Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang ditujukan untuk menjaga ketahanan sektor keuangan secara keseluruhan agar mampu untuk mengatasi risiko sistemik akibat gagalnya lembaga atau pasar keuangan yang berdampak menimbulkan krisis yang merugikan perekonomian (Bank Indonesia, 2012). Borio (2003) menjelaskan bahwa kebijakan makroprudensial memiliki tujuan antara dan tujuan akhir. Tujuan antara kebijakan makroprudensial adalah untuk mengendalikan risiko-risiko sistemik dan mempromosikan stabilitas keuangan dan tujuan akhir dari kebijakan makroprudensial adalah untuk memastikan keberlangsungan fungsi ekonomi yang stabil dan sehat dalam jangka panjang. Vinals (2011) menyatakan bahwa peran kebijakan makroprudensial dalam memitigasi risiko sistemik yaitu (i) kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi potensi ketidakseimbangan finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi; (ii) kebijakan makroprudensial dirancang untuk memperkuat pertahanan terhadap fase penurunan dalam siklus ekonomi; dan (iii) kebijakan ini berfokus pada pengidentifikasian dan penanganan potensi risiko yang dihasilkan dari eksposur

serupa, konsentrasi risiko, interkoneksi, dan ketergantungan antara lembaga-lembaga keuangan yang dapat menularkan risiko ke sistem keuangan secara keseluruhan.

Dalam mengukur adanya risiko sistemik, kebijakan makroprudensial memiliki dua dimensi yaitu cross-sectional dimension dan time dimension (Borio, 2003). Cross-sectional dimension mencerminkan risiko dalam sistem keuangan pada suatu titik waktu tertentu. Dimensi ini berfokus kepada risiko yang muncul dari berbagai individu lembaga keuangan yang memiliki eksposur yang serupa dan saling berhubungan/interconnected yang akan berpotensi menimbulkan risiko sistemik (Vinals, 2011). Menurut Yoel (2016) sebagian besar krisis keuangan yang terjadi bukan akibat dari masalah individual bank yang kemudian menular secara keseluruhan sistem keuangan, namun merupakan akibat dari eksposur terhadap ketidakseimbangan makro-keuangan yang dilakukan secara bersamaan oleh sebagian besar pelaku sistem keuangan. Pemantauan risiko dalam cross-sectional dimension melibatkan pengawasan terhadap perkembangan neraca dari lembaga keuangan, termasuk total aset, modal, kredit, dan deposit. Sementara itu, time dimension mengukur evolusi risiko sistemik dari waktu ke waktu antara sistem keuangan dan ekonomi riil. Pendekatan ini difokuskan pada pengendalian atau pengurangan risiko terkait dengan potensi prosiklikalitas yang berlebihan dalam sistem keuangan. Prosiklikalitas tersebut akan menyebabkan sistem keuangan dan perekonomian menjadi rentan terhadap guncangan khususnya dalam periode *upswing* (Vinals, 2011). Analisis risiko dalam time dimension dilakukan dengan memantau perkembangan indikator tertentu seperti rasio kredit terhadap GDP, kondisi likuiditas perbankan secara agregat, dan besaran moneter (Bank Indonesia, 2012).

Manajemen Risiko

Risiko dan bank merupakan dua elemen yang tidak terpisahkan satu sama lain. Kehadiran bank bergantung pada kemampuan dan keberanian untuk menghadapi risiko; bank hadir karena kesediaan untuk mengambil risiko, dan kemampuannya untuk bertahan tergantung pada kemauan untuk mengelola risiko tersebut. Namun, jika risiko tidak dikelola dengan baik, bank dapat mengalami kegagalan bahkan hingga kebangkrutan.

Dalam kaitannya dengan pemantauan dan pengendalian risiko, Bank dituntut untuk melakukan manajemen risiko yang sehat. Menurut Pandia (2012:198), pengertian manajemen risiko secara sederhana adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga dan masyarakat. Sehingga mencakup kegiatan perencanaan, mengorganisir, menyusun, memimpin dan mengkoordinasi, serta mengawasi (termasuk mengevaluasi) program penanggulangan risiko.

Bank Indonesia menurut Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tertanggal 19 Mei 2003, yang diperinci dalam lampiran surat edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003, manajemen risiko dijelaskan sebagai rangkaian langkah dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengontrol risiko yang timbul dari aktivitas operasional bank.

Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko melibatkan langkah-langkah yang dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh entitas terkait dalam suatu institusi. Langkah-langkah ini sesuai dengan definisi manajemen risiko yang mencakup identifikasi, pengukuran, penetapan sikap, penentuan solusi, serta pemantauan dan pelaporan risiko, sebagaimana yang dijelaskan oleh Pandia (2012; 201):

1. Melakukan Identifikasi dan Pemetaan Risiko

Proses identifikasi risiko melibatkan pengidentifikasian potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Pemetaan risiko merupakan langkah lanjutan dari identifikasi, di mana risiko-risiko yang teridentifikasi dianalisis lebih lanjut untuk memahami sifatnya, penyebabnya, dampaknya, serta keterkaitannya satu sama lain.

2. Melakukan Kuantifikasi Menilai/ Peringkat Risiko

Mengukur risiko-risiko tersebut untuk memahami tingkat keparahan dan probabilitas terjadinya serta dampaknya terhadap tujuan atau kegiatan entitas. Bisa dengan menggunakan metode *bench marking*, *modeling*, atau *forecasting*.

3. Menegaskan Profil Risiko/ Rencana Manajemen Risiko

Profil risiko atau rencana manajemen risiko merupakan dokumen yang merinci bagaimana entitas akan mengelola risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan operasional bagi entitas dalam menghadapi risiko-risiko yang teridentifikasi.

4. Solusi Risiko Implementasi Tindakan Mitigasi

a. Hindari (*Avoidance*)

Mengimplikasikan penghindaran aktivitas yang berpotensi merugikan.

b. Alihkan (*Transfer*)

Melibatkan pembagian risiko seperti pembagian biaya dengan pihak lain.

c. Mitigasi Risiko (*Mitigate Risk*)

Melibatkan penerimaan risiko pada tingkat tertentu dengan menerapkan kontrol yang lebih ketat, meningkatkan kualitas proses, dan *memberlakukan* aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya.

d. Menahan Risiko Residual (*Retention of Residual Risk*)

Menerima risiko yang tersisa setelah penerapan tindakan mitigasi, sering kali terkait dengan ketersediaan penyangga jika kerugian terjadi.

5. Pemantauan dan Pengkinian/ Kaji Ulang Risiko Dan Kontrol

Melalui sistematisasi dan terus-menerus, entitas atau institusi secara rutin memantau risiko-risiko yang mungkin memengaruhi stabilitas sistem keuangan, termasuk risiko-risiko makroekonomi, risiko operasional, risiko pasar, serta risiko-risiko lain yang relevan. Proses pemantauan ini melibatkan analisis yang mendalam terhadap tren dan perkembangan dalam perekonomian global dan domestik, serta perubahan dalam regulasi dan kebijakan. Selain itu juga melakukan evaluasi terhadap efektivitas kontrol yang diterapkan dalam mengelola risiko-risiko tersebut, termasuk penilaian terhadap kepatuhan bank-bank dan lembaga keuangan lainnya terhadap standar dan regulasi yang ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode analisis kualitatif yang bersumber dari buku-buku publikasi lembaga-lembaga keuangan seperti Bank Indonesia, OJK, BPK, dan sumber-sumber lain yang relevan dalam konteks pengendalian dan pemantauan risiko. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang evolusi kebijakan Bank Indonesia dalam menghadapi tantangan risiko, serta untuk mengevaluasi dampak kebijakan tersebut. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan implikasi kebijakan dalam pengendalian dan pemantauan risiko. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang perubahan kebijakan Bank Indonesia dalam menghadapi risiko finansial, serta untuk mengidentifikasi keterbatasan, tantangan, dan prospek masa depan dalam konteks pengaturan regulasi keuangan.

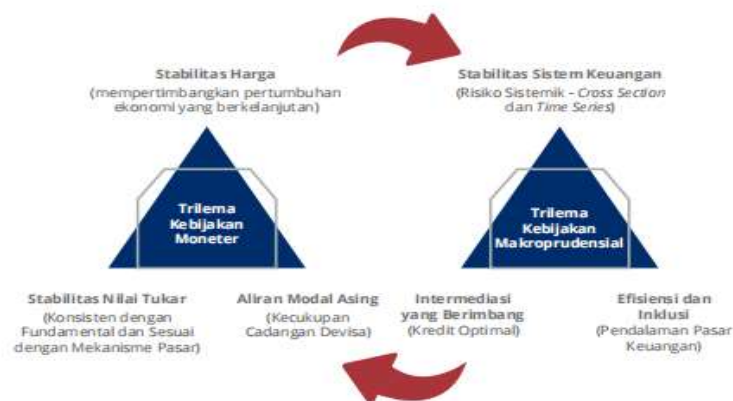
Metodologi penelitian ini akan mengadopsi pendekatan deskriptif dalam menganalisis data yang diperoleh, dengan menyajikan temuan secara sistematis dan komprehensif. Selain itu, pendekatan deskriptif akan memungkinkan peneliti untuk memberikan interpretasi yang mendalam terhadap data yang diperoleh dari sumber-sumber yang relevan. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang efektif dalam pengendalian dan pemantauan risiko di sektor keuangan. Dengan memahami evolusi kebijakan dan mengidentifikasi dampaknya, penelitian ini dapat membantu Bank Indonesia dan lembaga-lembaga keuangan lainnya untuk meningkatkan keselamatan dan stabilitas sistem keuangan, serta memperkuat sinkronisasi kebijakan dengan standar internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evolusi Kebijakan Bank Indonesia dalam Pengendalian dan Pemantauan Risiko

Selama lima tahun terakhir, Bank Indonesia (BI) telah mengembangkan kebijakan pengendalian dan pemantauan risiko yang mencerminkan kemampuan beradaptasi dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan keuangan. Selama tahun 2018-2019, Bank Indonesia (BI) aktif terlibat dalam mengendalikan dan memantau risiko-risiko yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia. Tantangan utama datang dari penurunan aliran modal asing yang dipicu oleh kenaikan Federal Funds Rate (FFR) di AS dan ketidakpastian di pasar keuangan global (Bank Indonesia, 2018). Dalam menghadapi risiko ini, BI mengambil langkah-langkah pre-emptive dan konservatif dalam kebijakan moneter, termasuk peningkatan suku bunga kebijakan dan optimalisasi kebijakan nilai tukar untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah.

Upaya juga dilakukan untuk memperkuat strategi operasi moneter guna menjaga likuiditas pasar uang dan perbankan serta meningkatkan ketahanan sektor eksternal melalui peningkatan jaring pengaman keuangan internasional (JPKI). Fokus BI terutama terletak pada stabilitas nilai tukar dan antisipasi terhadap potensi kenaikan inflasi, dengan penetapan suku bunga dan penerapan kebijakan moneter yang lebih konservatif, didukung oleh landasan hukum yang memberikan kerangka kerja untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko yang efektif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. BI mengambil langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah melalui intervensi pasar dan penyesuaian suku bunga acuan. Pendekatan ini didukung oleh landasan hukum, seperti Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, yang memberikan kerangka kerja untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko yang efektif. Kebijakan moneter akomodatif dilakukan Bank Indonesia dengan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) dan suku bunga kebijakan (Indonesia, 2019).



Sumber : Laporan Perekonomian Indonesia

Gambar 1. Kerangka Kerja Bauran Kebijakan Bank Indonesia

Pada tahun 2020, Bank Indonesia (BI) menghadapi tantangan yang signifikan akibat pandemi Covid-19, yang menyebabkan dampak multidimensi yang belum pernah terjadi sebelumnya pada kesehatan, sosial, dan ekonomi global (Bank Indonesia, 2020). Langkah-langkah kebijakan yang diambil untuk menanggapi pandemi ini, termasuk sinergi antara BI, Pemerintah, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Upaya kolaboratif ini melibatkan kombinasi dari kebijakan ekspansi moneter dan stimulus fiskal, yang diperkuat dengan komitmen BI untuk mendukung pendanaan dan berbagi beban pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020. Selain itu, kerja sama bilateral, regional, dan global diperkuat untuk mendukung sinergi kebijakan domestik tersebut. Meskipun dihadapkan pada tantangan yang besar, BI merespons pandemi Covid-19 dengan langkah-langkah kebijakan yang cepat dan tegas guna mengatasi dampaknya terhadap stabilitas makroekonomi. Kerja sama dengan Pemerintah dan KSSK menjadi kunci dalam menyusun bauran kebijakan yang efektif dalam menghadapi krisis tersebut. Sebagai bagian dari implementasinya, BI menerapkan kebijakan moneter yang akomodatif untuk menjaga likuiditas pasar dan meminimalkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, BI tetap memastikan kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip manajemen risiko, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, meskipun dalam kondisi yang tidak menentu seperti pandemi.

Pada tahun 2021, Bank Indonesia menegaskan pentingnya koordinasi kebijakan ekonomi yang sinergis dan inovatif sebagai fondasi untuk pemulihan ekonomi. Ini mencakup lima prasyarat kunci:

- 1) Upaya untuk mempercepat pertumbuhan dan transformasi sektor riil sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi.
- 2) Sinkronisasi kebijakan moneter, makroprudensial, dan fiskal untuk mencapai stabilitas ekonomi.
- 3) Peningkatan efisiensi dan adaptasi sektor keuangan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.
- 4) Penerapan teknologi digital dalam sektor ekonomi dan keuangan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
- 5) Fokus pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Kolaborasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Pusat dan Daerah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), sektor perbankan, dan pelaku bisnis juga diperkuat untuk mencapai

kinerja ekonomi nasional yang berkelanjutan. Inovasi kebijakan disesuaikan dengan kondisi global, domestik, dan kebijakan fiskal untuk mendukung reformasi struktural.

Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia dalam buku publikasi mengungkapkan dedikasi dan usaha yang kuat untuk mengatasi tantangan kompleksitas ekonomi akibat pandemi, beliau mengatakan "Sinergi kebijakan yang erat dan capaian perekonomian pada tahun 2021 menjadi dasar semangat untuk bangkit dan semakin optimis akan percepatan proses pemulihan ekonomi Indonesia pada tahun 2022" (Bank Indonesia, 2021). Sementara pada tahun 2022, Bank Indonesia menarik kesimpulan berharga dari pengaruh dinamika ekonomi global terhadap Indonesia. Terdapat tiga pelajaran utama yang dipetik (Indonesia, 2022):

- 1) Perluasan ketahanan pangan nasional guna mengurangi dampak fluktuasi harga pangan global dan meningkatkan ketersediaan pasokan lokal.
- 2) Diversifikasi sumber energi dan persiapan untuk beralih ke energi terbarukan guna mengatasi ketidakpastian pasokan energi.
- 3) Implementasi digitalisasi ekonomi secara menyeluruh untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam jangka menengah.

Dalam menghadapi risiko inflasi yang terkait dengan kenaikan harga energi dan pangan global pada periode 2021-2022, Bank Indonesia tetap memprioritaskan stabilitas harga melalui kerjasama erat dengan Pemerintah. Langkah-langkah seperti penyesuaian suku bunga dan penerapan regulasi, seperti Peraturan Bank Indonesia No. 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Pemberian Kredit Pemilikan Rumah, menjadi penting untuk mengendalikan risiko kredit di sektor perumahan, terutama dalam situasi ekonomi yang tidak menentu.

Pada tahun 2023, Bank Indonesia menetapkan bauran kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan moneter ditekankan pada menjaga stabilitas, sementara kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sinergi antara kebijakan Bank Indonesia dan kebijakan ekonomi nasional mencakup lima aspek utama, termasuk koordinasi fiskal dan moneter, akselerasi transformasi sektor keuangan dan riil, digitalisasi ekonomi dan keuangan, serta ekonomi dan keuangan inklusif dan hijau.

Perekonomian global pada tahun 2023 menghadapi tantangan serius akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya ketidakpastian. Meskipun pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan turun dari 3,5% menjadi 3,0%, serta 2,8% pada 2024, optimisme pemulihan awal tahun mulai memudar seiring berlanjutnya dampak luka memar dan

meningkatnya fragmentasi geopolitik-ekonomi (Bank Indonesia, 2023). Divergensi pertumbuhan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang semakin melebar, dengan pertumbuhan Tiongkok melambat sedangkan kinerja ekonomi India dan ASEAN-5 tetap stabil.

Meskipun inflasi dunia turun menjadi 6,8% pada Desember 2023 dari puncaknya pada triwulan II 2022, tetapnya pasar tenaga kerja membuat inflasi di negara maju masih jauh di atas sasaran yang diinginkan. Di sisi lain, beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia, telah berhasil menurunkan inflasi kembali ke tingkat yang sesuai dengan sasaran. Oleh karena itu, Bank Indonesia harus memantau dengan cermat perkembangan ini untuk mengendalikan risiko inflasi dan memastikan stabilitas ekonomi domestik di tengah dinamika global yang tidak menentu. BI dalam pengendalian dan pengawasan risiko selama lima tahun terakhir menunjukkan kemampuan beradaptasi dan ketangguhan dalam menghadapi perubahan lingkungan ekonomi dan keuangan. Selama periode tersebut, BI tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip manajemen risiko yang efektif dan memastikan kepatuhan terhadap standar internasional.

Evaluasi Dampak Kebijakan Pengendalian dan Pemantauan Risiko

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Bank Indonesia telah mematuhi sejumlah peraturan yang relevan, seperti Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Departemen Keuangan. Dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19, Bank Indonesia (BI) telah aktif berkolaborasi dengan pemangku kebijakan lainnya, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan, untuk merumuskan kebijakan yang efektif. Langkah-langkah ini diterjemahkan dalam UU No.2/2020 yang menjadi payung kebijakan untuk menangani dampak ekonomi dari pandemi. Dalam kerangka pengelolaan kebijakan moneter, Bank Indonesia menerapkan strategi yang tepat untuk mencapai kondisi optimal dalam trilemma kebijakan moneter, di mana kebijakan suku bunga dan nilai tukar disesuaikan dengan kebutuhan untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Salah satu respons BI dalam menanggapi pandemi adalah dengan memotong suku bunga kebijakan sebanyak enam kali hingga Desember 2021, mencapai level terendah 3,5%. Langkah ini bertujuan untuk merangsang aktivitas ekonomi dengan mengurangi suku bunga kredit dan memfasilitasi penyaluran kredit oleh perbankan. Selain itu, BI juga melakukan Quantitative Easing (QE) dengan menyuntikkan likuiditas pada sistem perbankan untuk mendorong penyaluran kredit kepada masyarakat. Selanjutnya, strategi intervensi dalam nilai

tukar juga dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memitigasi risiko volatilitas (BPK, 2022).

Sistem keuangan memiliki peran penting dalam menentukan tingkat bunga kredit serta jumlah kredit yang tersedia untuk mendukung produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi. Sistem ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kelancaran ekonomi. Jika tingkat bunga kredit naik dan ketersediaan dana terbatas, maka total pengeluaran untuk barang dan jasa akan menurun. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan aktivitas produksi dan berdampak pada sektor tenaga kerja, dimana perusahaan mungkin akan mengurangi jumlah karyawan, menyebabkan tingginya tingkat pengangguran (Abdullah & Wahjusaputri, 2018). Bank Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung fiskal pemerintah melalui kebijakan *burden sharing*, seperti pembelian obligasi pemerintah di pasar perdana. Selain itu, kebijakan makroprudensial yang akomodatif diterapkan untuk menjaga stabilitas keuangan dan mengelola risiko sistemik, seperti melalui pelanggaran *loan to value ratio*. Dalam menghadapi tantangan baru dalam era digital, BI juga mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung ekonomi keuangan digital nasional.

Selain itu, Bank Indonesia juga telah memperkuat manajemen risiko di sektor perbankan dengan menerapkan kebijakan penyaluran kredit yang lebih konservatif. Hal ini tercermin dari langkah-langkah pengaturan untuk memastikan kualitas kredit dan menghindari risiko kredit yang tidak diinginkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank yang Melaksanakan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah.

Dalam proses evaluasi, Bank Indonesia juga telah menunjukkan penggunaan data yang relevan dan akurat untuk mengevaluasi dampak kebijakan pengendalian dan pemantauan risiko. Metode analisis risiko dan pengawasan yang digunakan mencerminkan fokus pada pemahaman yang mendalam terhadap tantangan ekonomi dan keuangan yang dihadapi, sekaligus memastikan respons yang tepat dalam mengurangi risiko yang ada.

Selain mengatur kebijakan, Bank Indonesia juga aktif berkoordinasi dengan lembaga lain, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan, untuk memantau kinerja sektor keuangan secara menyeluruh dan menghadapi risiko yang dihadapi oleh Bank. Kerjasama lintas-lembaga ini memperkuat kerangka kerja manajemen risiko secara menyeluruh dalam sistem keuangan Indonesia. Evaluasi dampak kebijakan pengendalian dan pemantauan risiko yang dilakukan oleh Bank Indonesia selama lima tahun terakhir mencerminkan komitmen untuk mengelola risiko secara efektif, mematuhi regulasi yang berlaku, menggunakan data yang relevan, dan berkoordinasi dengan lembaga terkait. Hal ini

menjadi landasan yang kuat dalam memastikan stabilitas sistem keuangan dan menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks.

Sinkronisasi Kebijakan dengan Standar Internasional



Sumber : Website JDIH Kemenkeu

Gambar 2. Undang-Undang Republik Indonesianomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Menurut pedoman yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP yang diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2004, penilaian keadaan keuangan bank adalah sebuah evaluasi yang bersifat deskriptif terhadap berbagai faktor yang memengaruhi situasi atau kinerja suatu bank. Evaluasi ini melibatkan aspek-aspek seperti modal, kualitas aset, manajemen, profitabilitas, likuiditas, dan respons terhadap risiko pasar (Dangnga & Haeruddin, 2018).

Dalam konteks sinkronisasi kebijakan dengan standar internasional, Bank Indonesia beroperasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 57 dari UU No. 7 Tahun 2020 tentang Bank Indonesia. Pasal ini memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk menjalin kerjasama dengan Bank Sentral lainnya, organisasi, dan lembaga internasional. Lebih lanjut, Pasal 57(2) menyatakan bahwa jika anggota lembaga internasional atau lembaga multilateral adalah negara, Bank Indonesia dapat bertindak atas nama Republik Indonesia sebagai anggota.

Dalam upaya menerapkan praktik-praktik terbaik internasional, Bank Indonesia mengacu pada 25 prinsip pokok Basel untuk pengawasan perbankan yang efektif. Dalam jangka waktu lima tahun ke depan, Bank Indonesia berharap dapat menyelaraskan diri dengan negara-negara lain yang telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Pengawasan perbankan yang efektif mencakup pengawasan terkonsolidasi secara internasional terhadap bank yang beroperasi secara internasional, termasuk melalui cabang luar negeri, joint venture, dan anak perusahaan di luar negeri. Lebih lanjut, dalam konteks hubungan internasional, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab dan kegiatan sebagai berikut (Marbawi, 2017) :

- 1) Melakukan kerjasama dengan Bank Sentral lainnya, organisasi, dan lembaga internasional sesuai dengan Pasal 57 UU No. 7 Tahun 2020 tentang Bank Indonesia.
- 2) Jika anggota lembaga internasional atau lembaga multilateral adalah negara, Bank Indonesia dapat bertindak atas nama Republik Indonesia sebagai anggota, sesuai dengan ketentuan Pasal 57(2).

Selama lima tahun terakhir, Bank Indonesia (BI) telah mengambil langkah-langkah penting untuk menyelaraskan kebijakan moneter dan regulasi sistem keuangan dengan standar internasional. Salah satu aspek utamanya adalah adopsi dan implementasi standar internasional seperti Basel III, IFRS, dan Principles for the Supervision of Banks and Banking Systems. Implementasi Basel III memperkuat struktur modal bank dengan menetapkan kewajiban modal minimum untuk bank umum, bertujuan untuk memperkuat ketahanan sistem keuangan dan meminimalkan risiko krisis keuangan. Selain itu, BI meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan keuangan bank sesuai dengan standar IFRS, untuk memberikan informasi keuangan yang lebih jelas dan akurat kepada publik.

Dalam pengawasan, BI meningkatkan efektivitas supervisi bank dengan fokus pada risiko operasional dan kepatuhan bank terhadap regulasi yang berlaku, sesuai dengan Principles for the Supervision of Banks and Banking Systems. Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan operasional bank yang lebih efisien dan sesuai dengan standar internasional. BI juga memperhatikan standar internasional terkait kebijakan moneter, seperti Basel II dan Basel IV, dalam mengatur suku bunga dan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai rupiah.

Dalam sistem pembayaran, BI mengadopsi standar internasional seperti IFRS untuk memastikan transparansi dan efisiensi, yang meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan secara keseluruhan. Bank Indonesia berupaya untuk mencapai dan menjaga stabilitas nilai rupiah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Kestabilan nilai rupiah ini merujuk pada stabilitas harga-harga barang dan jasa yang tercermin dalam tingkat inflasi. Sejak tahun 2005, Bank Indonesia telah mengadopsi kerangka kebijakan moneter yang dikenal sebagai Infation Targeting Framework (ITF) dengan mengimplementasikan sistem nilai tukar yang mengambang (Himmati & Sari, 2021).

Keterbatasan dan Tantangan Terkini dan Prospek Masa Depan



Sumber : Laporan Perekonomian Indonesia 2023

Gambar 3 . Tantangan Ekonomi dan Sinergi untuk Memperkuat Ketahanan danKebangkitan Ekonomi Nasional

Selama lima tahun terakhir, Bank Indonesia (BI) telah menghadapi sejumlah keterbatasan dan tantangan yang mempengaruhi penetapan kebijakan dan pemantauannya. Salah satu keterbatasan yang dihadapi adalah terbatasnya sumber daya, seperti jumlah staf, infrastruktur, dan teknologi, yang dapat mempengaruhi efektivitas BI dalam menjalankan fungsinya. Misalnya, terbatasnya jumlah analis keuangan dapat memperlambat proses pengambilan keputusan terkait kebijakan moneter.

Tantangan teknologi juga menjadi isu yang signifikan bagi BI. Pengembangan sistem pembayaran elektronik yang aman dan efisien memerlukan investasi dalam teknologi yang canggih. Selain itu, ancaman cyber juga menjadi perhatian utama, memaksa BI untuk terus memperbarui sistem keamanan informasi mereka. Contoh konkretnya adalah pengembangan sistem pembayaran digital seperti *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*, yang memerlukan upaya besar dalam pengembangan dan perlindungan terhadap infrastruktur teknologi.

Keterbatasan informasi juga menjadi tantangan bagi BI, terutama dalam hal keterbatasan data yang akurat dan analisis yang mendalam. Misalnya, kurangnya data yang tersedia tentang tren konsumen atau perilaku pasar dapat mempersulit BI dalam membuat kebijakan moneter yang efektif. Untuk mengatasi tantangan ini, BI terus meningkatkan sistem pengumpulan data dan analisis mereka, serta memperkuat kerjasama dengan lembaga survei dan penyedia data independen. Selain paparan tersebut, ada 6 tantangan umum yang harus dilalui oleh Bank Indonesia. Tantangan pertama adalah potensi outbreak lanjutan akibat penyebaran varian baru COVID-19, seperti varian Omicron. Hal ini dapat mengganggu momentum pemulihan ekonomi yang telah tercapai. Tantangan kedua adalah spillover kenaikan harga energi dan komoditas lainnya, yang dapat mempengaruhi inflasi dan stabilitas ekonomi.

Sementara itu, unwinding stimulus fiskal dan moneter di negara-negara maju menjadi tantangan ketiga yang berpotensi menimbulkan gejolak di pasar keuangan global, termasuk di Indonesia. Tantangan lainnya adalah masalah debt overhang dan perusahaan zombies yang dapat menghambat pemulihan ekonomi. Pengelolaan isu climate-related financial risk juga menjadi tantangan yang penting, seiring dengan agenda global menuju ekonomi rendah karbon. Terakhir, percepatan transformasi digital, terutama di sektor jasa keuangan, diiringi dengan meningkatnya potensi risiko kecurangan, penyalahgunaan data pribadi nasabah, dan pencucian uang (BPK, 2022).

Meskipun dihadapkan pada tantangan tersebut, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan tetap positif. Pada tahun 2024

dan 2025, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada dalam kisaran 4,7-5,5% dan 4,8-5,6%. Proyeksi pertumbuhan ini diperkirakan akan terus meningkat ke angka 5,1-5,9% pada tahun 2026, dan bahkan mencapai 5,3-6,1% pada tahun 2028. Inflasi diproyeksikan tetap terkendali dalam kisaran sasaran $2,5\pm 1\%$ pada tahun 2024 dan 2025. Sementara itu, defisit transaksi berjalan diproyeksikan tetap rendah dan sehat dalam kisaran defisit 0,1% sampai dengan defisit 0,9% dari PDB pada tahun 2024, dan defisit 0,5% sampai dengan defisit 1,3% dari PDB pada tahun 2025.

Secara prospektif, BI berpotensi mengatasi sebagian besar tantangan ini melalui pengembangan dan investasi lebih lanjut dalam teknologi, peningkatan kerjasama internasional, dan peningkatan kualitas data dan analisis. Contoh dari proyeksi ini adalah upaya BI dalam mengembangkan platform pembayaran digital yang lebih aman dan efisien, kolaborasi dengan bank sentral lain untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, serta pengembangan sistem pemantauan data yang lebih canggih untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dengan demikian, meskipun dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan yang signifikan, BI memiliki prospek yang positif untuk mengatasi tantangan ini dan memperkuat peranannya dalam menjaga stabilitas keuangan Indonesia.

Jangkauan Navigasi Regulasi Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan yang mencakup berbagai aspek perbankan dan keuangan. Dari kebijakan-kebijakan yang telah disebutkan sebelumnya, Bank Indonesia tidak hanya bertanggung jawab atas kelancaran sistem pembayaran dan kestabilan nilai rupiah, tetapi juga mengatur penggunaan data pribadi nasabah, mediasi perbankan, kewajiban penyediaan modal minimum bank umum, dan transparansi informasi produk bank.

Sebagai sebuah bukti dari jangkauan regulasi Bank Indonesia dapat ditemukan dalam upaya mempromosikan inklusi keuangan. Melalui kebijakan perluasan jangkauan layanan keuangan, Bank Indonesia memberikan dukungan kepada lembaga keuangan mikro untuk mengubah statusnya menjadi bank, memungkinkan mereka untuk memberikan layanan keuangan kepada masyarakat di luar wilayah perkotaan (OJK, 2018). Dengan demikian, Bank Indonesia tidak hanya berfokus pada stabilitas sistem keuangan, tetapi juga pada upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman dan terjangkau.

Selain itu, dilingkup regional, Bank Indonesia juga memperhatikan prinsip kesamaan peluang atau prinsip resiprositas bagi perbankan Indonesia untuk beroperasi di wilayah ASEAN. Bank Indonesia bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk

mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa lintas batas, memastikan bahwa perselisihan yang mungkin timbul dapat diselesaikan secara adil dan efektif.

Melalui pelaksanaannya, Bank Indonesia dan OJK secara aktif mendorong perbankan nasional untuk meningkatkan kapasitasnya melalui proses konsolidasi. Ini dilakukan agar bank-bank nasional dapat bersaing secara efektif di pasar keuangan ASEAN. Langkah-langkah ini mencakup peningkatan permodalan dan infrastruktur, serta peningkatan kapabilitas dalam menghadapi persaingan di tingkat regional. Bagi usaha-usaha menengah dan besar, bank menyediakan kredit produksi dan ekspor-impor serta kredit distribusi berskala besar dengan jangkauan ke seluruh dunia (OJK, 2019).

Dengan demikian, Bank Indonesia tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dalam memastikan kestabilan sistem keuangan, memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, dan meningkatkan daya saing perbankan nasional di tingkat regional. Ini mencerminkan jangkauan regulasi yang luas dan progresif yang dimiliki oleh Bank Indonesia dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional serta regional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Bank Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan dalam pengendalian dan pemantauan risiko di sektor keuangan. Evolusi kebijakan tersebut tercermin dalam upaya Bank Indonesia untuk mengadaptasi strategi yang lebih responsif dan proaktif terhadap dinamika pasar dan perkembangan teknologi. Evaluasi dampak kebijakan pengendalian dan pemantauan risiko telah menjadi fokus utama dalam memahami efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Dari hasil evaluasi ini, Bank Indonesia dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan, serta mengeksplorasi solusi-solusi baru untuk meningkatkan keberhasilan kebijakan di masa mendatang.

Selain itu, sinkronisasi kebijakan dengan standar internasional menjadi prioritas penting bagi Bank Indonesia dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan pasar global. Bank Indonesia telah berupaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip terbaik yang tercakup dalam standar internasional, terutama dalam pengawasan perbankan dan manajemen risiko. Namun, tantangan terkini seperti perubahan kondisi ekonomi global, inovasi teknologi, dan regulasi yang dinamis memperumit proses sinkronisasi tersebut. Untuk itu, Bank Indonesia perlu terus melakukan kajian mendalam dan penyesuaian kebijakan agar tetap relevan dan efektif dalam

menghadapi tantangan masa depan. Dengan demikian, Bank Indonesia dapat memperkuat peran dan kontribusinya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Saran

1. Bank Indonesia perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberhasilan dan kelemahan kebijakan yang telah diterapkan dalam pengendalian dan pemantauan risiko. Ini meliputi analisis terhadap efektivitas kebijakan terdahulu dalam menangani risiko finansial, identifikasi area-area di mana kebijakan tersebut kurang optimal, serta pemahaman mendalam terhadap dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan. Dari hasil evaluasi ini, Bank Indonesia dapat mengeksplorasi solusi untuk memperbaiki atau meningkatkan kebijakan yang ada, seperti penyempurnaan regulasi, peningkatan pengawasan, atau pengembangan strategi baru dalam menghadapi risiko-risiko yang baru muncul.
2. Bank Indonesia juga perlu mampu menyesuaikan kebijakannya dengan perubahan lingkungan ekonomi, teknologi, dan regulasi yang dinamis. Hal ini termasuk respons terhadap perkembangan global, seperti perubahan kondisi ekonomi global, inovasi teknologi keuangan, dan perubahan kebijakan dari lembaga-lembaga internasional. Dengan memahami perubahan-perubahan ini, Bank Indonesia dapat mengidentifikasi solusi yang relevan, seperti memperkuat kolaborasi internasional, meningkatkan kemampuan teknologi, atau menyusun regulasi baru yang responsif terhadap dinamika pasar.
3. Selain itu, Bank Indonesia dapat mengambil langkah-langkah untuk memperkuat kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk lembaga keuangan, regulator, pemerintah, dan sektor swasta. Melalui kerjasama yang erat dan kolaboratif, Bank Indonesia dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengendalian risiko, serta mempercepat implementasi solusi-solusi yang efektif. Ini dapat dilakukan melalui forum-forum diskusi, pertemuan lintas sektoral, atau kemitraan strategis dengan lembaga-lembaga terkait. Dengan demikian, Bank Indonesia dapat meningkatkan efektivitas kebijakannya dalam menghadapi tantangan dalam pengendalian dan pemantauan risiko finansial.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Warjiyo, P. (2004). Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Syariah Di Indonesia. In *Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK)* (Vol. 2, Issue 2). Bank Indonesia. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v2i2.654>

Yoel, E. M. T. (2016). Pengaruh kebijakan makroprudensial terhadap siklus kredit: Sebuah studi atas penggunaan instrumen CAR dan GWM perbankan Indonesia 2006-2013. *Bina Ekonomi*, 20(1), 77-96.

Buku Teks

Abdullah, T., & Wahjusaputri, S. (2018). Bank & Lembaga Keuangan. In *Mitra Wacana Media* (Edisi 2). Mitra Wacana Media.

Borio, C. (2003). Towards a macroprudential framework for financial supervision and regulation. BIS Working Papers, 128.

Dangnga, M. T., & Haeruddin, M. I. M. (2018). Kinerja Keuangan Perbankan: Upaya Untuk Menciptakan Sistem Perbankan yang Sehat. In A. Akbar (Ed.), *Pustaka Taman Ilmu*. CV. Nur Lina.

Himmati, R., & Sari, C. M. (2021). *EKONOMI MONETER (teori dan soal)*. Akademia Pustaka. <http://repo.uinsatu.ac.id/25917/1/editorDr.H.Mashudi%2CM.Pd.I.pdf>

Marbawi. (2017). Bank & Lembaga Keuangan Lainnya Teori Dan Kebijakan. In W. Albra & M. Khaddafi (Eds.), *Unimal Press* (Revisi). NIMAL PRESS.

Vinals, J. (2011). Macroprudential policy: an organizing framework. IMF Paper.

Pandia, Frianto, 2012, Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank, Rineka Cipta, Jakarta

Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan

Bank Indonesia. (2018). *Laporan Perekonomian Indonesia 2018*. Bank Indonesia : Bank Sentral Republik Indonesia.

Bank Indonesia. (2020). Laporan Tahunan Bank Indonesia 2020. In *Bank Indonesia*. Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/Laporan-Akuntabilitas-Bank-Indonesia-2020.pdf>

Bank Indonesia. (2021). Tinjauan Kebijakan Moneter Desember 2021. In *Kebijakan Moneter*. Bank Indonesia. [https://www.bi.go.id/id/bi-institute/policy-mix/core/Documents/Kebijakan Moneter.pdf](https://www.bi.go.id/id/bi-institute/policy-mix/core/Documents/Kebijakan%20Moneter.pdf)

Bank Indonesia. (2023). *Laporan perekonomian Indonesia: Sinergi memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional*. Bank Indonesia.

BPK. (2022). Kebijakan Pemerintah, Peluang, Tantangan, Dan Kepemimpinan Di Masa Dan Pasca Pandemi COVID-19. In A. F. Sampurna (Ed.), *Richard III*. PT. Kompas Media Nusantara. <https://doi.org/10.2307/j.ctvqc6ghn.14>

Indonesia, B. (2019). Laporan Perekonomian Indonesia. In *Bauran Kebijakan Bank Indonesia* (pp. 54–71). Bank Indonesia.

Indonesia, B. (2022). *Sinergi dan Inovasi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Menuju Indonesia Maju*. Bank Indonesia.

- OJK. (2018). Booklet Perbankan Indonesia. In *Journal of Computer Science and Cybernetics*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). <https://doi.org/10.15625/1813-9663/1/1/6666>
- OJK. (2019). *Buku 2 Perbankan Seri Literasi Keuangan Perguruann Tinggi*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Bank Indonesia (2012). Booklet Perbankan Indonesia 2012. Diunduh dari http://www.bi.go.id/id/publikasi/perbankan-dan-stabilitas/booklet-bi/Pages/bpi_2012.aspx
- Bank Indonesia (2012). Basel III: global regulatory framework for more resilient banks and banking systems. Diunduh dari http://www.bi.go.id/id/perbankan/implementasi-basel/consultative-papers/Pages/cp_basel_III.aspx